

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- A. Mu'is, Komunikasi Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001)
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Solen) , (2012)
- Heru Effendy, Industri Perfilman Indonesia, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2008)
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006)
- Heru Erwantoro, Sensor Film di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Sejarah , (2011).
- Himpunan Peraturan Tentang Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT Tamita Utama, 2012)
- Marselli Soemarno, Apresiasi film : suatu pengantar (Jakarta : Pustaka Yayasan Citra tanpa tahun terbit)
- Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara, (Yogyakarta, 1981).
- Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi, (Jakarta: Prenada media, 2005)

Philipus M. Hadjon, et.all. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta ,Gajah Mada University Press, 2015)

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1984)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

2. Peraturan perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Undang - Undang Tentang Perfilman, UU No. 33 Tahun 2009, LN No. 141 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

3. Jurnal

Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.2 tahun 2018

Handi Oktavianus, “Penerimaan Penonton terhadap Praktek Eksorsis didalam Film Conjuring”, Jurnal E-Komunikasi, Vol.3 No.2 Tahun 2015

Kadek Cahya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal Crepido, Vol 1 No 1 tahun 2019

Nalal Muna, Indonesia Dalam Film Balibo Five, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, tahun 2017

4. Website

Ardysatria, “Apa yang dimaksud dengan wewenang pemerintah?”,
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wewenang-pemerintah/68503>

Christoforus Ristiano, AJI: Kita Akan Ambil Langkah Hukum Terkait Remisi Pembunuh Wartawan,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/18041151/aji-kita-akan-ambil-langkah-hukum-terkait-remisi-pembunuh-wartawan>

Hak untuk tahu adalah Hak Asasi Manusia,
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/29/167/hak-untuk-tahu-adalah-hak-asasi-manusia.html>

Hera Yulindasari, Tindakan pemerintah dalam implementasi hukum administrasi negara,
https://www.researchgate.net/publication/336878175_TINDAKAN_PEMERINTAH_DALAM_IMPLEMENTASI_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA

“Prosedur”, <https://lembagasensorfilm.com/v2/hal-prosedur.html>

Sistem Pemerintahan Indonesia,

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>